



- |  |         |
|--|---------|
| DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA<br>Zulkarnain  | 1-15    |
| MODEL <i>INTEGRATED</i> DIKOMBINASI <i>VALUE CLARIFICATION</i><br><i>TECHNIQUE</i> DALAM PEMBELAJARAN IPS SEJARAH<br>Idrus & Anna Sylvia Ibrahim | 16-32   |
| KONSEP DEWA RAJA DALAM NEGARA TRADISIONAL<br>ASIA TENGGARA<br>Sudrajat   | 33-37   |
| PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA<br>Dyah Kumalasari   | 48-73   |
| STUDI EKSPLORASI PERSEPSI GURU IPS SMP KABUPATEN<br>SLEMAN TERHADAP IPS TERPADU<br>Anik Widiastuti & Satriyo Wibowo                              | 74-83   |
| KEBIJAKAN EKONOMI AUSTRALIA MASA PAUL KEATING:<br>HUBUNGANNYA DENGAN INDONESIA<br>Danar Widiyanta  | 84-91   |
| FAKTOR-FAKTOR PENDORONG MUNCULNYA REVOLUSI<br>SOSIAL DI KABUPATEN BREBES<br>Aman   | 92-108  |
| KLAIM MITOS HAK BIBLIKAL BANGSA YAHUDI<br>ATAS TANAH PALESTINA   | 109-119 |

# STUDI EKSPLORASI PERSEPSI GURU IPS SMP KABUPATEN SLEMAN TERHADAP IPS TERPADU

ANIK WIDIASTUTI & SATRIYO WIBOWO

Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Yogyakarta

## Abstract

*The curriculum implementation sue the social studies teaching implemented in an integrated manner emerging pro and contra in the society, especially for the social studies teacher who have monodisipliner education like geography, history, economy, and sociology. According to the problem, this research aims to investigate: 1) the perception of the social studies teacher in Sleman Regency to the integrated social studies, 2) the difference of the perception of the social studies teacher in Sleman Regency to the integrated social studies based on the education level. This research is an explorative descriptive study. The population were 239 teacher and the sampel took 48 teachers (20% from the population) using proportional random sampling. The result shows that: 1) the perception of the social studies teacher in Sleman Regency to the integrated social studies is not good, shows with the majority of the social studies teachers in Sleman Regency (45.84%) have bad perception, 2) there is no difference social studies teacher in Sleman Regency to the integrated social studies based on education level.*

*Keyword: perception, integrated social studies*

## Abstrak

Penerapan kurikulum yang menuntut pembelajaran IPS dilaksanakan secara terpadu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama bagi guru-guru IPS yang memiliki pendidikan bidang studi geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Melihat permasalahan di atas maka penelitian ini ingin mengetahui: 1) persepsi guru IPS SMP Kabupaten Sleman terhadap IPS terpadu, 2) ada tidaknya perbedaan persepsi guru IPS SMP Kabupaten Sleman terhadap IPS terpadu berdasar tingkat pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif dengan populasi sebanyak 239 guru dan diambil sampel sebanyak 20% yaitu sebanyak 48 guru dengan teknik proportional random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) persepsi guru IPS SMP Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori tidak baik yang ditunjukkan dengan mayoritas guru IPS SMP Kabupaten Sleman 45,84% memiliki persepsi dalam kategori tidak baik, 2) tidak terdapat perbedaan persepsi guru IPS SMP Kabupaten Sleman terhadap IPS terpadu ditinjau berdasar tingkat pendidikan.

Kata Kunci: persepsi, IPS terpadu

## PENDAHULUAN

Perubahan dalam setiap aspek kehidupan perlu mendapat perhatian oleh pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Hal ini harus dilakukan agar pendidikan dapat menghasilkan kualitas lulusan yang dapat bersaing di era global. Pembangunan yang perlu dilakukan yaitu pembangunan di bidang pendidikan, terutama dalam pembenahan kurikulum. Isu yang sering beredar dalam masyarakat yaitu setiap ganti menteri pendidikan akan selalu diiringi dengan pergantian kurikulum adalah tidak benar. Pada dasarnya pergantian kurikulum yang terjadi seiring dengan adanya perubahan jaman.

Menurut Dion Eprijum Ginanto, kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Setidaknya sudah 9 kali perubahan kurikulum tercatat dalam sejarah, yakni Kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 dan 2006 (<http://www.scribd.com/doc/15072980>).

Pemberlakuan kurikulum SD, SMP, dan SMA tahun 1975 memunculkan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai mata pelajaran dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya (Sapriya, 2009: 7). Sedangkan kaitannya dengan istilah Pendidikan IPS menurut Muhammad Numan Somantri (2001: 74) adalah sebagai berikut:

Pendidikan IPS di Indonesia adalah penyerhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial dan segala sesuatu yang sifatnya sosial yang diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai sentralnya untuk mencapai tujuan pendidikan (nasional) khususnya dan pembangunan nasional umumnya.

Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh *National Council for Social Studies (NCSS)* (Sapriya, 2009: 39) bahwa "*Social studies is integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence*". Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas pelajaran IPS adalah adanya integrasi atau perpaduan berbagai mata pelajaran dengan materi yang bersifat kontekstual agar lebih bermakna bagi siswa dan mampu mendidik siswa menjadi warga negara yang baik.

Pendidikan IPS dalam kepustakaan asing disebut dengan berbagai istilah seperti *Social Studies*, *Social Education*, *Citizenship Education*, dan *Social Science Education*. Sedangkan batasan PIPS di Indonesia adalah program pendidikan yang memilih bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humanitis yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (Muhammad Numan Somantri, 2001: 79). Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS di Indonesia bersumber dari pengorganisasian ilmu-ilmu sosial dan humanities.

Pendidikan IPS untuk tingkat sekolah bisa diartikan sebagai: (1) Pendidikan IPS yang menekankan pada tumbuhnya

## PENDAHULUAN

Perubahan dalam setiap aspek kehidupan perlu mendapat perhatian oleh pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Hal ini harus dilakukan agar pendidikan dapat menghasilkan kualitas lulusan yang dapat bersaing di era global. Pembangunan yang perlu dilakukan yaitu pembangunan di bidang pendidikan, terutama dalam pembenahan kurikulum. Isu yang sering beredar dalam masyarakat yaitu setiap ganti menteri pendidikan akan selalu diiringi dengan pergantian kurikulum adalah tidak benar. Pada dasarnya pergantian kurikulum yang terjadi seiring dengan adanya perubahan jaman.

Menurut Dion Eprijum Ginanto, kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Setidaknya sudah 9 kali perubahan kurikulum tercatat dalam sejarah, yakni Kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 dan 2006 (<http://www.scribd.com/doc/15072980>).

Pemberlakuan kurikulum SD, SMP, dan SMA tahun 1975 memunculkan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai mata pelajaran dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya (Sapriya, 2009: 7). Sedangkan kaitannya dengan istilah Pendidikan IPS menurut Muhammad Numan Somantri (2001: 74) adalah sebagai berikut:

Pendidikan IPS di Indonesia adalah penyerhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial dan segala sesuatu yang sifatnya sosial yang diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai sentralnya untuk mencapai tujuan pendidikan (nasional) khususnya dan pembangunan nasional umumnya.

Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh *National Council for Social Studies (NCSS)* (Sapriya, 2009: 39) bahwa "*Social studies is integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence*". Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas pelajaran IPS adalah adanya integrasi atau perpaduan berbagai mata pelajaran dengan materi yang bersifat kontekstual agar lebih bermakna bagi siswa dan mampu mendidik siswa menjadi warga negara yang baik.

Pendidikan IPS dalam kepustakaan asing disebut dengan berbagai istilah seperti *Social Studies*, *Social Education*, *Citizenship Education*, dan *Social Science Education*. Sedangkan batasan PIPS di Indonesia adalah program pendidikan yang memilih bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humanitis yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (Muhammad Numan Somantri, 2001: 79). Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS di Indonesia bersumber dari pengorganisasian ilmu-ilmu sosial dan humanities.

Pendidikan IPS untuk tingkat sekolah bisa diartikan sebagai: (1) Pendidikan IPS yang menekankan pada tumbuhnya

nilai-nilai kewarganegaraan, moral ideologi negara dan agama; (2) Pendidikan IPS yang menekankan pada isi dan metode berpikir ilmuan sosial; (3) pendidikan IPS yang menekankan pada *reflective inquiry*; dan (4) Pendidikan IPS yang mengambil kebaikan-kebaikan dari butir 1, 2, 3, di atas" (Muhammad Numan Somantri, 2001: 44).

Groos (Sekar Purbarini Kawuryan, 2008: 24) menyatakan bahwa tujuan utama pembelajaran IPS adalah untuk melatih siswa bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sapriya (2009: 12) bahwa tujuan pendidikan IPS di tingkat sekolah adalah untuk "mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik". Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan IPS mempunyai tujuan untuk membentuk warga negara yang baik.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS atau studi sosial itu

merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial.

Program pendidikan IPS merupakan program yang mencakup empat dimensi meliputi dimensi pengetahuan, dimensi ketrampilan, dimensi nilai dan sikap serta dimensi tindakan (Sapriya, 2009: 48). Dimensi tersebut berbeda-beda satu sama lain. Di dalam kegiatan pembelajaran hendaknya dimensi-dimensi tersebut dapat tercakup dan saling melengkapi demi tercapainya tujuan pembelajaran IPS.

Perubahan kurikulum juga berdampak pada mata pelajaran IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran (Balitbang Pusat Kajian Kurikulum Depdiknas, 2007: 5). Pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS amanatkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat IPS yang merupakan ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan sebagainya, yang dimaksud untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat (<http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf>).

Berdasarkan ketentuan umum struktur kurikulum SD/MI dan SMP/MTs substansi mata pelajaran IPS merupa-

faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang berbeda antara satu dengan yang lainnya adalah:

- Faktor intern, antara lain: perasaan, sikap dan kepribadian individual, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi dari individu.
- Faktor ekstern, antara lain: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebudayaan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanaan, pengulangan gerakan, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengajukan permasalahan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi guru IPS SMP Kabupaten Sleman terhadap IPS terpadu?
2. Adakah perbedaan persepsi guru IPS SMP Kabupaten Sleman terhadap IPS terpadu ditinjau berdasar tingkat pendidikan?

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi guru IPS SMP Kabupaten Sleman terhadap IPS terpadu.
2. Untuk mengetahui adanya perbedaan persepsi guru IPS SMP

Kabupaten Sleman terhadap IPS terpadu ditinjau berdasar tingkat pendidikan.

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, dilihat dari sifat dan tujuannya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksploratif, karena hanya bertujuan menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Deskriptif eksploratif dalam penelitian ini yaitu menggambarkan persepsi guru IPS SMP Kabupaten Sleman terhadap IPS terpadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif karena data yang terkumpul berwujud angka-angka dan diolah dengan menggunakan analisis statistik dengan bantuan program *SPSS 17 for windows*.

Penelitian ini dilakukan di SMP yang terletak di Kabupaten Sleman dengan subjek penelitian guru IPS SMP dalam lingkup Dinas Pendidikan. Penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru IPS SMP Kabupaten Sleman yang termasuk dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, guru IPS SMP berjumlah 239 orang. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 20% dari total populasi yaitu sebanyak 48 guru yang diambil dengan teknik random sampling. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan angket yang berisi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang

guru tidak bersungguh-sungguh dalam mengajar, yang tentunya hal ini dapat menghambat jalannya proses pembelajaran di kelas. Jika proses pembelajaran tidak optimal maka kualitas siswa juga menjadi tidak baik dan dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Persepsi guru yang tidak baik terhadap IPS terpadu dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hakikat IPS terpadu, kurangnya pemahaman tujuan pembelajaran IPS, dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai IPS terpadu. Padahal seharusnya pemerintah dapat berperan aktif dan menjadi motor penyukseskan kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional.

IPS yang dipandang sebagai mata pelajaran yang merupakan gabungan dari berbagai bidang studi geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi belum diterima sebagai mata pelajaran yang sifatnya terpadu. Guru IPS masih terdiri dari guru berbagai bidang studi yang berdiri sendiri-sendiri, yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki yaitu guru geografi, guru ekonomi, guru sejarah, dan guru sosiologi bukan guru IPS. Sehingga guru pun belum memahami hakikat IPS yang seharusnya atau yang biasa disebut sebagai IPS terpadu, yang menyebabkan tidak baiknya persepsi terhadap IPS terpadu.

Dalam melihat persepsi guru terhadap IPS terpadu, dikategorikan menjadi 8

indikator yang meliputi: pemahaman ke-IPS-an, pendekatan pembelajaran IPS, kebijakan IPS terpadu, pelaksanaan pembelajaran IPS terpadu, perangkat pembelajaran, materi, partisipasi siswa, dan evaluasi. Dari kedelapan indikator tersebut yang memiliki skor tertinggi adalah pada indikator pemahaman ke-IPS-an dan skor terendah pada indikator perangkat pembelajaran.

Hal ini menunjukkan bahwa guru memiliki pemahaman terhadap IPS terpadu dengan baik namun perangkat pembelajaran yang digunakan belum disusun dalam keterpaduan sebagaimana pembelajaran IPS seharusnya. Guru belum memiliki ketrampilan menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, dan bahan ajar/modul dalam bentuk IPS terpadu karena pada kenyataannya masih mengajar secara monodisipliner dalam bidang studi geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi.

Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya guru meningkatkan kemampuannya dalam menyusun perangkat pembelajaran IPS terpadu yang dapat ditempuh dengan sering mengikuti pelatihan-pelatihan IPS terpadu ataupun mengikuti seminar dan workshop mengenai IPS terpadu. Selain itu dibutuhkan pula semangat dan kemauan yang tinggi dari guru untuk melakukan pembaharuan dalam pembelajarannya karena pembelajaran IPS terpadu merupakan hal yang tergolong baru bagi pembelajaran IPS di sekolah yang selama ini dilakukan secara monodisipliner.

## 2. Persepsi Guru IPS SMP Kabupaten Sleman terhadap IPS Terpadu Ditinjau Berdasar Tingkat Pendidikan

Untuk memperoleh data tentang persepsi guru IPS SMP Kabupaten Sleman terhadap IPS terpadu ditinjau berdasar tingkat pendidikan dilakukan dengan analisis *crosstabs* atau tabulasi silang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

IPS terpadu termasuk dalam kategori tidak baik, untuk guru berpendidikan terakhir diploma 3 (D3) terdapat 3 orang guru yang memiliki persepsi terhadap IPS terpadu dalam kategori cukup baik. Bagi guru berpendidikan tertinggi atau magister (S2) terdapat 1 guru (2,08%) yang memiliki persepsi terhadap IPS terpadu dalam kategori baik. Melihat hasil analisis *crosstabs* di atas, dapat

Tabel 2. Persepsi Guru Terhadap IPS Terpadu Berdasar Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Persepsi						Jumlah	
	Baik		Cukup baik		Tidak baik		F	%
	F	%	F	%	F	%		
D1	0	0,00	0	0,00	1	2,08	1	2,08
D3	0	0,00	3	6,25	0	0,00	3	6,25
S1	6	12,51	16	33,33	21	43,75	43	89,59
S2	1	2,08	0	0,00	0	0,00	1	2,08
Jumlah	7	14,59	19	39,58	22	45,83	48	100,0

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2012

Berdasarkan tabel 2 yang dianalisis dengan perhitungan persentase secara total dari seluruh responden, dapat diketahui bahwa sebagian besar guru IPS SMP Kabupaten Sleman berpendidikan terakhir sarjana (S1), dan didominasi oleh guru yang memiliki persepsi terhadap IPS terpadu dalam kategori tidak baik yaitu sebanyak 21 guru atau 43,75%. Sedangkan untuk guru berpendidikan diploma satu (D1) terdapat 1 orang guru (2,08%) dengan persepsi terhadap

disimpulkan bahwa mayoritas guru memiliki persepsi terhadap IPS terpadu dalam kategori tidak baik jika ditinjau berdasar tingkat pendidikan.

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi terhadap IPS terpadu antara guru berpendidikan terakhir diploma, sarjana, dan magister berdasar analisis statistik, dilakukan uji beda dengan *Chi Square* yang hasilnya dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.775 <sup>a</sup>	6	.067
Likelihood Ratio	11.129	6	.084
Linear-by-Linear Association	.920	1	.337
N of Valid Cases	48		

a. 9 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .15.

Dari hasil analisis *Chi Square* di atas, perhitungan uji beda signifikansi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,067. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan persepsi guru berpendidikan terakhir diploma, sarjana, dan magister terhadap IPS terpadu. Perbedaan yang terlihat pada tabel 2 tidak terlalu signifikan sehingga tidak dianggap berarti, atau dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi guru terhadap IPS terpadu ditinjau berdasar tingkat pendidikan.

Hasil analisis *chi square* yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi guru ditinjau berdasar tingkat pendidikan atau dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada persepsi guru terhadap IPS terpadu. Tingkat pendidikan yang berbeda-beda mulai dari D1, D3,

S1, dan S2 ternyata tidak memberikan dampak pada persepsi guru. Hal ini dimungkinkan karena latar belakang pendidikan yang dimiliki guru memang bukan berasal dari IPS terpadu, melainkan guru bidang studi geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi sehingga persepsi mereka terhadap IPS terpadu masih dapat dikategorikan sama.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi guru IPS SMP Kabupaten Sleman terhadap IPS terpadu termasuk dalam kategori tidak baik. Hal ini ditunjukkan dalam hasil penelitian yang menyatakan bahwa 45,84% dari responden memiliki persepsi tidak baik.
2. Tidak terdapat perbedaan persepsi guru IPS SMP Kabupaten

## PENDAHULUAN

- Sleman terhadap IPS terpadu antara guru yang memiliki tingkat pendidikan terakhir D1, D3, S1 dan S2.
3. Dalam rangka memberikan alternatif pemecahan terhadap persepsi guru terhadap IPS terpadu terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:
  4. Guru IPS SMP yang memiliki persepsi tidak baik terhadap IPS terpadu harus dapat mengubah persepsinya menjadi lebih baik agar dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru tidak terhambat.
  5. Guru IPS SMP harus memiliki keyakinan dan berpikiran positif terhadap kebijakan IPS terpadu, walaupun guru dituntut untuk dapat mengajar IPS secara terpadu dan tidak sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya.
- Bimo Walgito. (1997). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset
- Miftah Thoha. (1996). *Perilaku organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Numan Somantri. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sapriya. (2009). *Pendidikan IPS. konsep dan pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Sekar Purbarini Kawuryan. (Mei 2008). "Pentingnya pendidikan IPS di Sekolah Dasar sebagai kerangka dasar nation and character building", dalam *Dinamika Pendidikan. Majalah Ilmu Pendidikan*, 1, 21-33.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dion Eprijum Ginanto. (2006). *Perjalanan kurikulum di Indonesia*. <http://www.scribd.com/doc/15072980/Perjalanan-Kurikulum-Di-Indonesia>. diunduh pada 11 Februari 2010. Pukul 8.17 WIB
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *UU Sisdiknas*. <http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf>. Diunduh pada tanggal 18 Juni 2011, Pukul 8.27 WIB.